

## PERANAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dendy Syaiful Akbar  
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis  
dendysyaiful1984@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan sebagai berikut: 1) BPK menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD yaitu tentang penatausahaan asset tetap di antaranya tanah Pemda yang belum bersertifikat, dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya; 2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran yang riil; 3) Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan data yang valid; 4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut. Khususnya yang diterima PEMDA dari BPJS kesehatan pada periode januari sampai dengan april 2014 atau sebelum terbitnya Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi; 4) Keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Mengetahui dan mendeskripsikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Mengetahui dan mendeskripsikan peranan karakteristik pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa Karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pemerintahan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.*

*Kata Kunci: Karakteristik Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*

### I. Pendahuluan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berkutat di pusat (Kuncoro, 2004:11).

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan sebagai berikut: 1) BPK menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD yaitu tentang penatausahaan asset tetap di antaranya tanah Pemda yang belum bersertifikat, dan bahkan tidak dapat

ditelusuri keberadannya; 2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang syah dan sesuai dengan pengeluaran yang riil; 3) Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan data yang valid; 4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut. Khususnya yang diterutama PEMDA dari BPJS kesehatan pada periode mjanuari sampai dengan april 2014 atau sebelum terbitnya Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi; 5) Keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda.

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini yaitu untuk: 1) Mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik pemerintah daerah Kota Tasikmalaya; 2) Mengetahui dan mendeskripsikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya; 3) Mengetahui dan mendeskripsikan peranan karakteristik pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya.

## II. Metode

Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dasar penelitian deskriptif analisis. Tujuan penelitian secara deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan berbagai fenomena yang diselidiki.

Terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu karakteristik pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Wardhani, (2009:54) mengemukakan bahwa karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah pemerintah daerah, dan membedakannya dengan pemerintah daerah lain. Mutu dan luas pengungkapan laporan keuangan masing-masing berbeda. Perbedaan ini dapat terjadi karena karakteristik, kebijakan, budaya, filosofi manajemen masing-masing entitas juga berbeda.

Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi total aset, porsi pendapatan asli daerah, jumlah anggota legislatif, total utang dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Mustikarini dan Fitriasari, (2012:21) menyatakan bahwa semakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan banyaknya jumlah anggota legislatif seharusnya diharapkan akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kinerja yang baik dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat.

Lebih lanjut Mustikarini dan Fitriasari, (2012:22) menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah dengan kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity* dan *intergovernmental revenue* diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa karakteristik pemerintah daerah sebagai berikut:

### 1. Kemakmuran (*wealth*)

Menurut Halim, (2007:232) menyatakan bahwa: Kemakmuran masyarakat suatu daerah itu dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD karena semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD akan menggambarkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : < 10%     |
| Baik        | : 10% - 20% |
| Cukup Baik  | : 21% - 30% |
| Kurang Baik | : 31% - 40% |
| Tidak Baik  | : > 40%     |

### 2. Ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah anggota legislatif

Menurut Budianas, (2005:83) menyatakan bahwa DPRD sebagai wakil pemilik daerah (masyarakat) memiliki peran landasan membina dan memberikan masukan dalam pelaksanaan keuangan daerah. Perhitungan untuk mengukur ukuran legislatif yaitu dengan cara melihat jumlah anggota DPRD.

### 3. *Leverage* atau Utang

Menurut anggraeni, (2003:126) menyatakan bahwa pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari pinjaman atau utang kepada pihak lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun utang pemerintah juga dapat menimbulkan beban utang yang akan membebani anggaran pemerintah.

Perhitungan *Leverage* yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai *Leverage* dapat dikategorikan sebagai berikut :

Sangat Baik : 100% - 80%

Baik : 79% - 60%

Cukup Baik : 59% - 30%

Kurang Baik : 29% - 15%

Tidak Baik : < 10%

#### 4. *Intergovernmental Revenue* atau Pendapatan antar pemerintah

Menurut Suroso, (2004:57) menyatakan bahwa ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal mengindikasikan kemandirian daerah masih bergantung terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Perhitungan *Intergovernmental Revenue* yaitu dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Intergovernmental\ Revenue = \frac{Total\ Dana\ Perimbangan}{Total\ Pendapatan} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai *Intergovernmental Revenue* dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat Baik : 100%

Baik : 90% - 80%

Cukup Baik : 79% - 55%

Kurang Baik : 50% - 40%

Tidak Baik : < 40%

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Sucipto (2005:36) kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

## 1. Penerimaan Pendapatan Daerah

Menurut M.Hanafi, (2002:77) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai realisasi pendapatan yang diharapkan berdasarkan potensi riil daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif. Perhitungan rasio pos-pos penerimaan pendapatan daerah pemerintah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

### a. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### b. Sumber Penerimaan Pendapatan Transfer

$$\text{Intergovernmental Revenue) = } \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

### c. Sumber Penerimaan Pendapatan lain-lain

$$\text{Pendapatan lain-lain} = \frac{\text{Lain-lain pendapatan yang sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : 100%      |
| Baik        | : 99% - 90% |
| Cukup Baik  | : 89% - 70% |
| Kurang Baik | : 60% - 50% |
| Tidak Baik  | : < 40%     |

## 2. Realisasi Belanja Daerah

Menurut Darmawan, (2005:80) menyatakan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan dana untuk pembelanjaan daerah secara rutin dan optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja daerah maka penyediaan sarana dan prasarana masyarakat semakin baik. Perhitungan rasio pos-pos belanja daerah pemerintah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

### a. Belanja Operasi

$$\text{Belanja operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

### b. Belanja Modal

$$\text{Belanja modal} = \frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

### c. Belanja Tidak Terduga

$$\text{Belanja tidak terduga} = \frac{\text{Total Belanja tidak terduga}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai realisasi belanja daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : 100%      |
| Baik        | : 99% - 90% |
| Cukup Baik  | : 89% - 70% |
| Kurang Baik | : 60% - 50% |
| Tidak Baik  | : < 40%     |

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Sementara itu analisis data dilakukan dengan cara menganalisis secara deskriptif mengenai peran Karakteristik Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### III. Hasil

Karakteristik pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam penelitian ini menggunakan porsi pendapatan asli daerah, jumlah anggota legislatif, porsi total kewajiban atau utang, dan porsi total dana perimbangan. Adapun untuk mengukur karakteristik pemerintah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

#### 1. Kemakmuran (*Wealth*)

Penelitian ini pun menggunakan total pendapatan asli daerah sebagai proksi untuk mengukur kemakmuran masyarakat pemerintah daerah kota tasikmalaya. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : < 10%     |
| Baik        | : 10% - 20% |
| Cukup Baik  | : 21% - 30% |
| Kurang Baik | : 31% - 40% |
| Tidak Baik  | : > 40%     |

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai pendapatan asli daerah pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi (2013)} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.172.883.279.898,06}}{\text{Rp.1.365.593.492.674,06}} \times 100\% \\ &= 12,66 \text{ atau } 13\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi (2014)} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.253.450.505.778,21}}{\text{Rp.1.595.664.661.290,21}} \times 100\% \\ &= 15,88 \text{ atau } 16\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio diatas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 sebesar 15,88% lebih besar dibandingkan dengan kontribusi tahun 2013 sebesar 12,66%. Dengan persentase tersebut pengelolaan PAD Kota Tasikmalaya dikategorikan baik dan dilihat dari jumlah pendapatan asli daerahnya pun dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah ini diperoleh dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

## 2. Ukuran Legislatif

DPRD sebagai badan legislatif mempunyai fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah agar Pemerintah Daerah dapat mengelola anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Jumlah anggota DPRD kota Tasikmalaya masa jabatan 2014-2019 yaitu berjumlah 45 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 171/KEP.1173-PEM.UM/2014 tentang pengangkatan anggota DPRD terpilih kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- Dapil 1 sebanyak 12 orang anggota DPRD
- Dapil 2 sebanyak 10 orang anggota DPRD

- Dapil 3 sebanyak 11 orang anggota DPRD
- Dapil 4 sebanyak 12 orang anggota DPRD

Namun dengan jumlah anggota DPRD tersebut, pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih buruk. Karena masih banyaknya anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sedikitnya kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna mengakibatkan buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Sehingga DPRD belum dapat melakukan fungsi pengawasannya dengan baik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 3. *Leverage*

Penelitian ini pun menggunakan proksi pembiayaan utang untuk mengukur total kewajiban pemerintah daerah kota tasikmalaya. Dengan rumus sebagai berikut :

$$Debt = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efisien *Leverage* dapat dikategorikan sebagai berikut :

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sangat Baik | : 100% - 80% |
| Baik        | : 79% - 60%  |
| Cukup Baik  | : 59% - 30%  |
| Kurang Baik | : 29% - 15%  |
| Tidak Baik  | : < 10%      |

Berikut penulis sajikan mengenai perhitungan *Leverage* pemerintah kota tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Debt\ (2013) &= \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\% \\ &= \frac{Rp.24.247.177.962,00}{Rp.3.332.084.085.887,20} \times 100\% \\ &= 72,77\ \text{atau}\ 73\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Debt\ (2014) &= \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\% \\ &= \frac{Rp.11.747.343.083,00}{Rp.3.787.849.132.716,70} \times 100\% \\ &= 31,01\ \text{atau}\ 31\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio diatas terlihat bahwa *Leverage* Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 sebesar 72,77% lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 31,01%. Dengan persentase tersebut pengelolaan *Leverage* Kota Tasikmalaya dikategorikan Cukup

baik dan dilihat dari jumlah *Leverage* dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

#### 4. *Intergovernmental Revenue*

Penelitian ini menggunakan *Intergovernmental Revenue* untuk mengetahui ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Secara umum, pengukuran nilai *Intergovernmental Revenue* dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : 100%      |
| Baik        | : 90% - 80% |
| Cukup Baik  | : 79% - 55% |
| Kurang Baik | : 50% - 40% |
| Tidak Baik  | : < 40%     |

Berikut penulis sajikan mengenai perhitungan rasio *Intergovernmental Revenue* pemerintah kota tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Intergovernmental Revenue (2013)} &= \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.756.557.906.043,00}}{\text{Rp.1.365.593.492.674,06}} \times 100\% \\ &= 55,40 \text{ atau } 55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Intergovernmental Revenue (2014)} &= \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.845.802.099.130,00}}{\text{Rp.1.595.664.661.290,21}} \times 100\% \\ &= 53,01 \text{ atau } 53\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio diatas dapat diketahui bahwa kontribusi total dana perimbangan Kota Tasikmalaya terhadap Total Pendapatan Daerah pada tahun 2014 adalah sebesar 53,01% atau turun sebesar 3,64% bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar sebesar 55,40%. Dengan persentase tersebut pengelolaan *Intergovernmental revenue* Kota Tasikmalaya dikategorikan Cukup baik dan dilihat dari jumlah *Intergovernmental revenue* dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan walaupun ketergantungan terhadap sumber dana dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup dominan, namun dalam tahun 2014 prosentasi ketergantungan mengalami penurunan.

Dari hasil penelitian kelima indikator karakteristik pemerintah daerah tersebut dapat dinyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah kota tasikmalaya secara keseluruhan sudah cukup baik namun belum optimal. Artinya bahwa karakteristik pemerintah daerah tersebut masih dapat ditingkatkan kembali.

Adapun untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pendapatan Daerah

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kota tasikmalaya dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi rasio penerimaan pendapatan daerah pemerintah kota tasikmalaya. Secara umum, pengukuran nilai realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : 100%      |
| Baik        | : 99% - 90% |
| Cukup Baik  | : 89% - 70% |
| Kurang Baik | : 60% - 50% |
| Tidak Baik  | : < 40%     |

Berikut penulis sajikan perhitungan rasio pos-pos penerimaan pendapatan daerah pemerintah kota tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut:

##### a. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai pendapatan asli daerah pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi (2013)} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.172.883.279.898,06}}{\text{Rp.1.365.593.492.674,06}} \times 100\% \\ &= 12,66\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Derajat Desentralisasi (2014)} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.253.450.505.778,21}}{\text{Rp.1.595.664.661.290,21}} \times 100\% \\ &= 15,88\%\end{aligned}$$

##### b. Sumber Penerimaan Pendapatan Transfer

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai pendapatan transfer pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Intergovernmental Revenue (2013)} &= \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.756.557.906.043,00}}{\text{Rp.1.365.593.492.674,06}} \times 100\% \\ &= 55,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Intergovernmental Revenue (2014)} &= \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.845.802.099.130,00}}{\text{Rp.1.595.664.661.290,21}} \times 100\% \\ &= 53,01\% \end{aligned}$$

c. Sumber Penerimaan Pendapatan lain-lain

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai pendapatan lain-lain pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan lain-lain} = \frac{\text{Lain-lain pendapatan yang sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan lain-lain (2013)} &= \frac{\text{Lain-lain pendapatan yang sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.211.359.464.730,00}}{\text{Rp.1.365.593.492.674,06}} \times 100\% \\ &= 15,48\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan lain-lain (2014)} &= \frac{\text{Lain-lain pendapatan yang sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.198.707.858.696,00}}{\text{Rp.1.595.664.661.290,21}} \times 100\% \\ &= 12,45\% \end{aligned}$$

Dari total realisasi Penerimaan pendapatan daerah kota Tasikmalaya tahun 2013 sebesar Rp.1.365.593.492.674,06 paling besar terserap oleh realisasi pendapatan transfer pemerintah yaitu sebesar 55,40%, Pendapatan asli daerah sebesar 12,66% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 15,48%. Sedangkan total realisasi Penerimaan pendapatan daerah kota Tasikmalaya tahun 2014 sebesar Rp.1.595.664.661.290,21 paling besar terserap oleh realisasi pendapatan transfer pemerintah yaitu sebesar 53,01%, Pendapatan asli daerah sebesar 15,88% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 12,45%.

Dengan demikian realisasi penerimaan pendapatan daerah pemerintah kota Tasikmalaya yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 83,54% dan tahun 2014 sebesar 81,34% dinyatakan realisasinya sudah cukup baik. Artinya dalam laporan realisasinya tidak mengalami defisit dan upaya peningkatan pendapatan masih bisa ditingkatkan kembali.

## 2. Realisasi Belanja Daerah

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kota tasikmalaya dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi realisasi belanja daerah pemerintah kota Tasikmalaya. Secara umum, pengukuran nilai realisasi belanja daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Sangat Baik | : 100%      |
| Baik        | : 99% - 90% |
| Cukup Baik  | : 89% - 70% |
| Kurang Baik | : 60% - 50% |
| Tidak Baik  | : < 40%     |

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai rasio realisasi belanja daerah kota tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut:

### a. Belanja operasi

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai belanja operasi pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Belanja operasi (2013)} &= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.1.049.647.418.988,00}}{\text{Rp.1.311.030.641.333,00}} \times 100\% \\ &= 80,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja operasi (2014)} &= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.1.172.407.488.817,00}}{\text{Rp.1.456.073.879.776,00}} \times 100\% \\ &= 80,52\% \end{aligned}$$

### b. Belanja Modal

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai belanja modal pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal (2013)} &= \frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.261.383.222.345,00}}{\text{Rp.1.311.030.641.333,00}} \times 100\% \\ &= 19,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Belanja modal (2014)} &= \frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.276.775.401.438,00}}{\text{Rp.1.456.073.879.776,96}} \times 100\% \\ &= 19,01\% \end{aligned}$$

c. Belanja Tidak Terduga

Berikut penulis sajikan perhitungan mengenai belanja operasi pemerintah kota Tasikmalaya periode tahun 2013-2014 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Belanja tidak terduga (2014)} &= \frac{\text{Total Belanja tidak terduga}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp.6.890.989.521,00}}{\text{Rp.1.456.073.879.776,96}} \times 100\% \\ &= 0,47\%\end{aligned}$$

Dari total realisasi belanja daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 sebesar Rp.1.311.030.641.333,00 paling besar terserap oleh realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 80,06%, belanja modal sebesar 19,94%. Sedangkan total realisasi belanja daerah kota Tasikmalaya tahun 2014 sebesar Rp.1.456.073.879.776,96 paling besar terserap oleh realisasi belanja operasi yaitu sebesar 80,52%, belanja modal sebesar 19,01% dan belanja tak terduga sebesar 0,47%.

Dengan demikian realisasi belanja daerah pemerintah kota Tasikmalaya yang digunakan untuk berbagai macam belanja daerah dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100% dan tahun 2014 sebesar 100% dinyatakan realisasinya sudah baik. Dan secara keseluruhan hasil penelitian indikator kinerja keuangan pemerintah daerah sudah cukup baik diharapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dapat untuk ditingkatkan kembali.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Terbukti hasil penelitian analisis karakteristik pemerintah Kota Tasikmalaya dan kinerja keuangannya cukup baik. Dimana karakteristik pemerintah daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan teori Ihyaul Ulum M.D (2009:32), yang mengemukakan bahwa semakin baik karakteristik pemerintah daerah, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan berperan dalam menunjang aktivitas untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik tersebut maka akan berdampak terciptanya *good government governance*.

Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu karakteristik pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah

daerah yang memiliki karakteristik pemerintahan yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Karakteristik pemerintah daerah kota Tasikmalaya secara keseluruhan sudah cukup baik namun belum optimal. Karena anggota legislatif belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa karakteristik pemerintah daerah tersebut masih dapat untuk ditingkatkan kembali.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tasikmalaya secara keseluruhan sudah cukup baik namun belum optimal. Karena pengelolaan belanja modal realisasinya belum stabil. Artinya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut masih dapat untuk ditingkatkan kembali.
3. Karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pemerintahan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.

#### Daftar Pustaka

- Adi. 2005. *Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy*. Economic Journal of Emerging Markets.
- Antaraneews.com. 2008. *Auditing and assurance services: an intergated approach*. Ed.12th. Pearson Education: USA.
- Azhar. 2000. *Local government measurement use to focus on performance and results. Evaluation and Program Planning 24 (2001) 95-101*. USA.
- Darma. 2005. *Sosialisasi Manual EKPPD TA 2008 Implementasi PP Nomor 6 Tahun 2008. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan EKPPD*. Pasuruan Jawa Timur.
- Fitriyanti dan Pratolo. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2009. *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tahun 2007 Tingkat Nasional*.
- Handra dan Maryati. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No.1. Hal 1-17. <http://www.bppk.depkeu.go.id>.
- Hasibuan. 2009. *New Public Management: What to Take and What to Leave*. Public Management Service. OECD.
- Ihyaul Ulum M.D. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta. Cetakan kelimabelas. Salemba.

- Robbins, Walter A., Austin, Kenneth R. "Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure". *Journal of Accounting Research*. Vol. 24. No. 2. pp. 412-421.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sarwono, Jonathan. 2008. *Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Andi. Jakarta.
- Sjoberg, Peter. 2003. *Government Expenditure Effect on Economic Growth: The Case of Sweden 1960-2001*. Lulea University of Technology.
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication. Canada.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.